



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKj-IP SKPD)**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2020. Melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2020, Dinas Pendidikan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja yang dilakukan pada tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Tahun 2020 (RKT), dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2020. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas keterlibatan serta dukungannya dalam memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Tangguh dan Sejahtera (TUNTAS).

Jambi, Februari 2021 M.
Rajab 1442 H.

Plt. KEPALA DINAS,

dto

BUKRI, SP

Pembina

NIP. 19730621 200501 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 5
2.1 Perencanaan Strategik.....	5
2.2 Perjanjian Kinerja.....	11
 BAB II AKUNTABILITAS KINERJA.....	 12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran.....	30
 BAB IV PENUTUP.....	 33
 Lampiran :	
Perjanjian Kinerja	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Kedudukan

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan unsur Pemerintah Provinsi Jambi yang diberi tanggungjawab di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan rganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

1.1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Permasalahan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan diatas, maka Dinas Pendidikan tentunya memiliki mandat untuk menghadapi tantangan penting yang harus dihadapi dalam kurun waktu tahun 20016-2021 sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kabupaten dan kota.

3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah.
4. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
5. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.
6. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

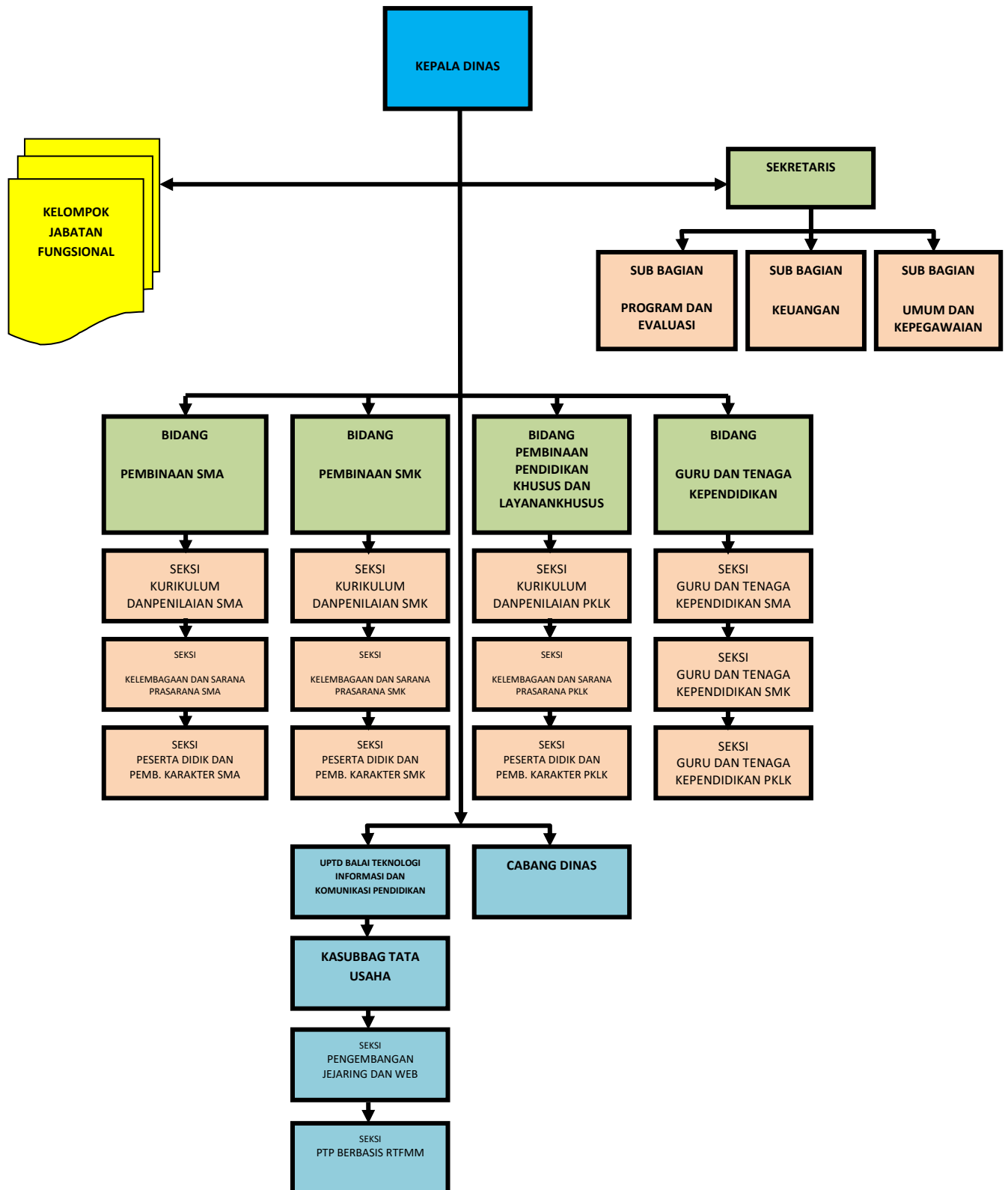
Adapun permasalahan utama Dinas pendidikan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan di Provinsi Jambi, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah
2. Belum meratanya ketersediaan lembaga pendidikan antar kabupaten dan kota
3. Banyak kondisi infrastruktur sekolah yang rusak
4. Belum optimalnya proses belajar mengajar akibat keterbatasan sarana prasarana
5. Distribusi dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidik yang belum merata
6. Sistem informasi manajemen yang berbasis TIK pada satuan pendidikan belum berjalan
7. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang masih umum
8. Masih rendahnya lulusan sekolah menengah yang diserap sebagai tenaga kerja pada dunia usaha dan industri

1.1.4 Stuktur Organisasi

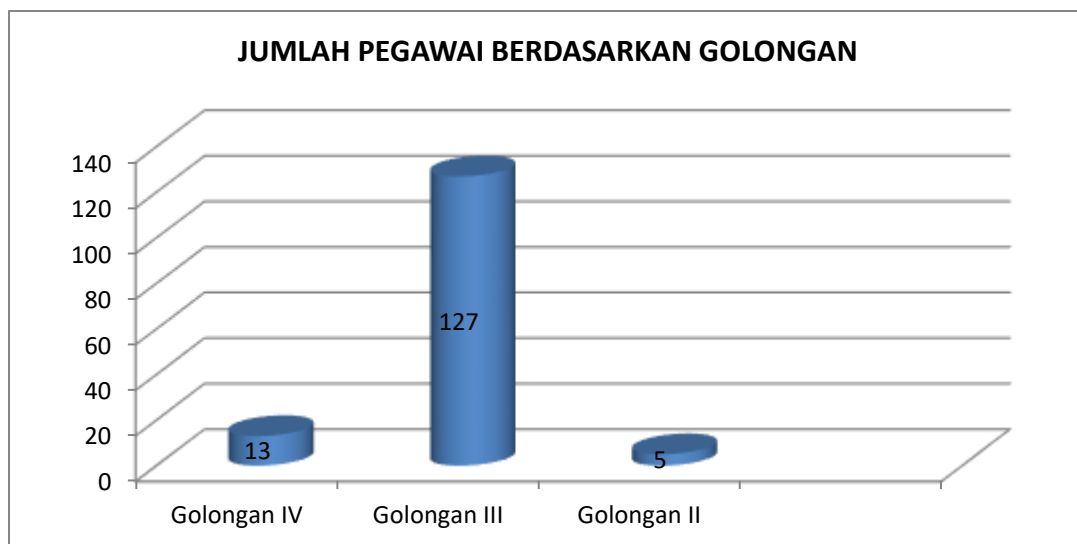
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI**
(Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016)



Struktur organisasi diatas dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2020 sebanyak 155 orang yang diurai pada diagram berikut :

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi J Jambi Berdasarkan Golongan Tahun 2020.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi

Visi Pemerintah Provinsi Jambi adalah “Tertib,Unggul, Tangguh, Adil, dan Sejahtera” (Jambi TUNTAS 2021).

Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan.Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan misi, yaitu Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya agama dan berkesetaraan gender.

Hal tersebut tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, melainkan dibutuhkan kerjasama dan sinergitas yang baik dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jambi serta stakeholders pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, misi yang ditetapkan tersebut mengisyaratkan pentingnya keterlibatan/partisipasi dari berbagai pihak.

Untuk memberikan kebersamaan langkah dalam mencapai tujuan perlu kiranya dirumuskan nilai-nilai instansi yang akan dianut bersama. Nilai-nilai ini harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugas yang nantinya akan terkait erat dengan kegiatan pelayanan yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada stakeholder/masyarakat.

Pemilihan nilai-nilai tersebut bukan berarti mengesampingkan nilai-nilai luhur lainnya. Berikut nilai-nilai luhur Dinas Pendidikan Provinsi Jambi :

1) Profesionalisme

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

Kapabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengingat perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat tersebut mustahil akan dapat direspons dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana kegiatan/program/kebijakan organisasi, dan kapabilitas pegawai tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan harus melalui suatu proses yang terencana dan berkesinambungan serta didukung dengan penyediaan sarana penunjang yang baik, tepat dan memadai.

Dengan kapabilitas yang tinggi, pegawai akan terpicu untuk bekerja dengan berorientasi pada hasil. Di samping itu, kapabilitas yang tinggi tersebut akan dapat mendorong terhadap peningkatan integritas moral/etika untuk berinteraksi dengan rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar organisasi.

2) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak. Selain itu, organisasi tidak bisa hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka.

3) Kemitraan

Di dalam era demokrasi yang sedang berkembang saat ini, pola-pola kerja kemitraan perlu dikembangkan dan diupayakan

menghindarkan diri dari pola-pola lama yang menggunakan pendekatan kewenangan (*power approach*) ke pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan stakeholder (*stakeholder oriented approach*), sehingga terjalin hubungan yang harmonis/positif dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Jajaran Kementrian Agama dan stakeholders pendidikan lainnya.

2.1.2 Keterkaitan NAWACITA, Misi Kemendikbud, Misi Pemerintah Provinsi serta Janji Politik Gubernur.

Tabel 2.1 Keterkaitan NAWACITA, Misi Kemendikbud, Misi Pemerintah Provinsi Jambi serta Politik Gubernur

NAWA CITA	MISI KEMENDIKBUD	MISI PROVINSI JAMBI	JANJI POLITIK GUBERNUR
Nawa Cita 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Nawa Cita 6. Meningkatkan Produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional Nawa Cita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa Nawa Cita 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Misi 1 : Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat Misi 2 : Mewujudkan akses yang meluas dan merata Misi 3. Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu Misi 4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Misi 5 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya agama dan berkesetaraan gender	1. Pemberian tambahan penghasilan non Guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah 3. Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis 4. Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/ swasta

Dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan antara pemerintah, kementerian, pemerintah provinsi, dan janji politik gubernur terpilih, dalam penyusunan restra ini disandingkanlah program-program

tersebut sehingga terdapat benang merah masing-masing program. Melalui upaya ini diharapkan semua program kegiatan yang disusun dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Jambi, dan pada akhirnya akan bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Jambi

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah untuk mendukung pencapaian misi kedua pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APM SMA	44,63%	45,56%	46,53%	48,54%	50,68%	52,98%
			APK SMA	53,19%	53,30%	55,46%	57,85%	60,41%	63,15%
			APM SMK	25,17%	26,20%	27,18%	27,13%	27,20%	27,98%
			APK SMK	30,01%	30,98%	31,95%	31,74%	31,42%	30,98%
			Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah	NA	NA	20%	22%	24%	26%
			Angka melanjutkan ke PT. Akreditasi 'B' (SMA)	42,30%	45,47%	48,88%	52,55%	56,49%	60,73%
			Angka melanjutkan ke PT. Akreditasi 'B' (SMK)	42,30%	45,47%	48,88%	52,55%	56,49%	60,73%
			Tingkat Kelulusan SMA	99%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%
			Tingkat Kelulusan SMK	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%	99,5%
			Persentase tamatan SMK yang bekerja	35%	40%	45%	50%	55%	60%
			Persentase Guru yang Bersertifikasi	37,49%	40,30%	43,32%	46,57%	50,06%	53,81%

2.1.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan sebelumnya serta memperhatikan kekuatan/kelemahan yang dimiliki dan peluang-pelung/ ancaman yang ada, selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan pendidikan dalam priode lima tahun mendatang. Strategi merupakan cara mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntut pencapaian tujuan dan visi organisasi pada akhirnya.

1. Strategi

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan Pendidikan Menengah

2. Kebijakan

- a. Menyediakan Pendidik yang Berkualitas dan Merata
- b. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Akademik

3. Program dan Kegiatan Indikatif

- a. Program Pendidikan SMA dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - APM SMA
 - APK SMA
 - Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"
 - Tingkat Kelulusan SMA
- b. Program Pendidikan SMK dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - APM SMK
 - APK SMK
 - Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"
 - Tingkat Kelulusan SMK
 - Persentase tamatan SMK yang bekerja
- c. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :

- Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :

- Persentase Guru yang bersertifikasi

Dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pendidikan			
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah.	a) Menyediakan Pendidik yang Berkualitas dan Merata	Program Pendidikan SMA	<ul style="list-style-type: none"> • APM SMA • APK SMA • Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" • Tingkat Kelulusan SMA
	b) Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Akademik	Program Pendidikan SMK	<ul style="list-style-type: none"> • APM SMK • APK SMK • Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" • Tingkat Kelulusan SMK • Persentase tamatan SMK yang bekerja
		Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase guru yang bersertifikasi

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi membuat Perjanjian Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK	(SMA) 60,41%
			(SMK) 31,42%
		APM	(SMA) 50,68%
			(SMK) 27,20%
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	24%
		Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	56,49%
		Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,40%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	55%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 (B)
		Nilai AKIP	64 (B)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2020 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2020 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2020 dengan realisasinya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut ini disajikan capaian dan analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk setiap indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

A. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 3.2 Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indkator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK SMA	60,41%	39,71%	65,73%
		APM SMA	50,68%	33,86%	66,81%
		APK SMK	31,42%	26,94%	85,74%
		APM SMK	27,20%	21,87%	80,40%
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	24%	6,26%	26,08%
		Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	56,49%	36%	63,73%
		Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,40%	99%	99,60%
		Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	55%	30%	54,54%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	79,31	96,72%
		Nilai AKIP	64	67 (B)	104,69%
Rata-rata Capaian Kinerja					74,40

Berdasarkan tabel 3.2 diatas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dengan 10 indikator sebagai tanda keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dari total capaian indikator tersebut rata-rata persentase capaiannya sebesar 74,40% atau masuk kriteria "Sedang". Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat di jelaskan berikut ini :

1. **Sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus” dengan indikator sebagai berikut :**

a. **APK SMA dan SMK**

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu APK SMA memiliki realisasi sebesar 39,71% dengan target 60,41% maka persentase capaiannya sebesar 65,73% atau kategori sedang dan realisasi APK SMK sebesar 26,94% dengan target 31,42% maka persentase capaiannya sebesar 85,74% atau kategori tinggi.

b. **APM SMA dan SMK**

Pada indikator APM SMA memiliki realisasi sebesar 33,86% dengan target 50,68% maka persentase capaiannya sebesar 66,81% atau kategori sedang dan realisasi APM SMK sebesar 21,87% dengan target 27,20% maka persentase capaiannya sebesar 80,40% atau kategori tinggi.

c. **Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah**

Pada indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah memiliki realisasi sebesar 6,26% dengan target 24% maka persentase capaiannya sebesar 26,08% atau kategori sangat rendah.

d. **Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"**

Pada indikator Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" memiliki realisasi sebesar 36% dengan target 56,49% maka persentase capaiannya sebesar 63,73% atau kategori rendah.

e. **Tingkat Kelulusan SMA/SMK**

Pada indikator Tingkat Kelulusan SMA/SMK memiliki realisasi sebesar 99% dengan target 99,40% maka persentase capaiannya sebesar 99,60% atau kategori sangat baik.

f. Persentase Tamatan SMK yang Bekerja

Pada indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja memiliki realisasi sebesar 30% dengan target 55% maka persentase capaiannya sebesar 54,54% atau kategori sedang.

2. Sasaran kedua “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja” dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada sasaran strategis kedua, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki realisasi sebesar 79,31 dengan target 82% maka persentase capaiannya sebesar 96,72% atau kategori sangat baik.

b. Nilai AKIP

Pada indikator nilai AKIP memiliki realisasi sebesar 67 dengan predikat B dengan target 64 maka persentase capaiannya sebesar 104,69% atau kategori sangat baik.

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu 2019 dan beberapa tahun terakhir (2018)

Tabel 3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu 2019 dan beberapa tahun terakhir (2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		Capaian 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	11	12			8
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK SMA	74,55	72,57	60,41%	39,71%	65,73%
		APM SMA	65,11	73,29	50,68%	33,86%	66,81%
		APK SMK	86,33	91,10	31,42%	26,94%	85,74%
		APM SMK	77,79	85,54	27,20%	21,87%	80,40%
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	20,84	24,54	24%	6,26%	26,08%
		Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	70,17	66,60	56,49%	36%	63,73%
		Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,82	99,62	99,40%	99%	99,60%
		Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	88,89	68,74	55%	30%	54,54%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	95,86	82	79,31	96,72%
		Nilai AKIP	NA	104,83	64	67 (B)	104,69%

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

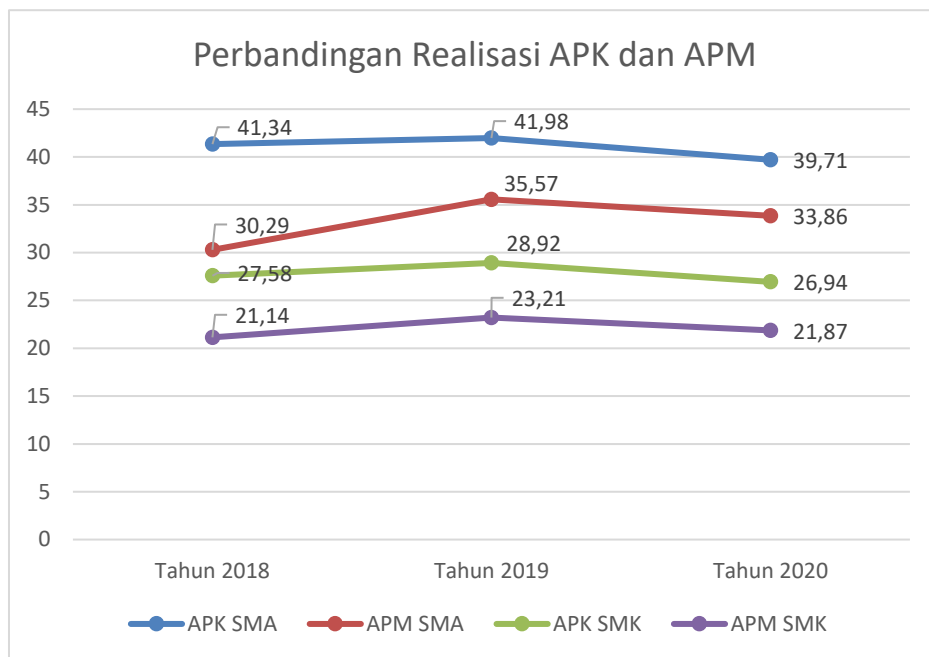
Tabel. 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target RPJMD Tahun 2020

No	Indikator	Awal RPJMD	Capaian			Target	Capaian s/d 2020 terhadap target 2021 (%)
			2018	2019	2020		
1	Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi B	42,30%	34,31%	35%	36%	56,49%	63,73%
2	Tingkat Kelulusan SMA dan SMK	94%	98,85	98,92%	99%	99,40%	99,60%

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator APK dan APM pada SMA dan SMK Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir (2018)



Jika dilihat dari tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dengan target pada indikator APK dan APM SMA dan SMK tahun 2020 realisasinya masih jauh dari target yang diharapkan. Jika dilihat dari grafik 3.1, realisasi indikator APK dan APM SMA dan SMK mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020. Adapun hambatan dalam pencapaian Indikator APK dan APM pada jenjang pendidikan SMA dan SMK, antara lain :

1. Masih ada budaya pada masyarakat yang menjadi hambatan untuk mendukung meningkatnya APK yaitu anak putus sekolah yang disebabkan menikah di usia dini seperti menikah pada saat di bangku SMP.
2. Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh anak yang masih berusia sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga.

3. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

1. Mendekatkan layanan pendidikan (pendirian unit sekolah baru) kepada masyarakat pada wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk menekan pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik.
2. Optimalisasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Daerah terhadap Pencegahan Perkawinan Anak untuk Mendukung Wajib Belajar 12 Tahun, karena Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak dan hanya menyelesaikan pendidikan SMP/ sederajat,

2. Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator ABK bersekolah Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir (2018)



Jika dilihat dari tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2020, pada indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah yang realisasinya masih jauh dari target, namun bila dilihat dari grafik 3.2 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk melakukan inovasi dan kebijakan yang akan mendorong masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah. Adapun hambatan dalam pencapaian Indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah antara lain

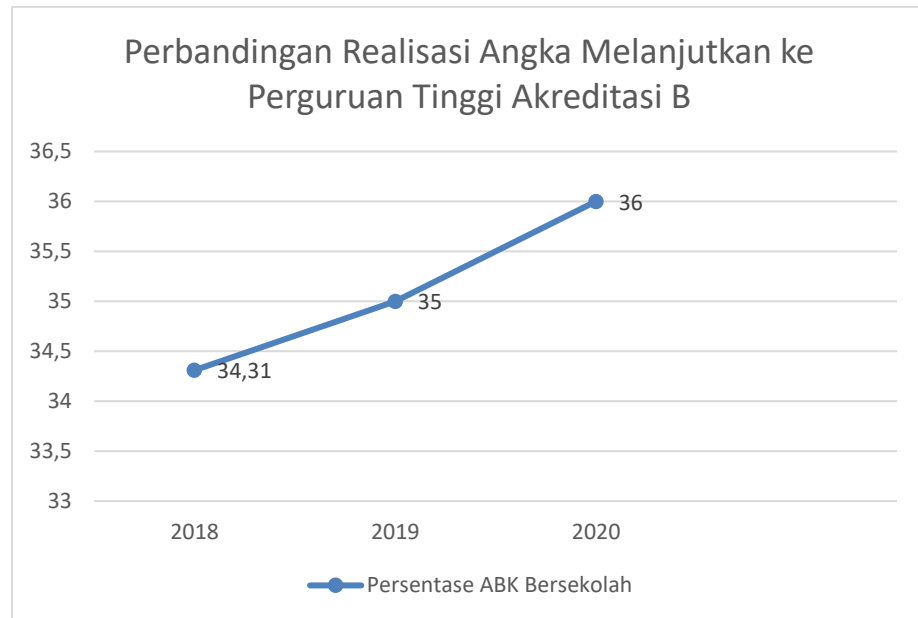
1. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa mempunyai ABK adalah sebuah aib atau hal yang memalukan bagi keluarga yang seharusnya memberikan pendidikan (intervensi) yang bisa membuat ABK hidup mandiri dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat namun orang tua lebih senang mengucilkan mereka dari dunia luar.
2. Sama halnya dengan permasalahan di bidang Pendidikan menengah, permasalahan pada Pendidikan Khusus juga masih terbatasnya satuan pendidikan khusus di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan diatas diantaranya :

1. Pemerintah Provinsi Jambi sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mewujudkan apa yang telah dituliskan dalam undang-undang diantaranya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang sesuai bagi ABK sehingga anak berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan baik dimasyarakat.
2. Menambah Unit Sekolah Baru (USB) SLB di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi karan masih sangat minim Satuan Pendidikan khusus terutama di wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk menekan pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik.

3. Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"

Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Angka Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Akreditasi B Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan beberapa terakhir (2018)



Jika dilihat dari grafik 3.3, indikator Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 namun jika dilihat tabel. 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2020 masih jauh dari target yang diharapkan,.

Bagi siswa yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi terkreditasi tentunya ada tahap yang harus dilalui diantaranya lulus dari jenjang pendidikan setara menengah dan lulus seleksi mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang sudah terakreditasi. Dari tahap tersebut tentunya adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dan perlunya solusi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Adapun hambatan untuk lulus seleksi atau diterima di Perguruan Tinggi berakreditasi B adalah Siswa cenderung takut atau tidak memiliki minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi diakibatkan dikarenakan tidak memiliki prestasi belajar yang dibanggakan, disinilah peranan guru dan orang tua yang harus diperhatikan, dimana antara orang tua siswa dengan guru

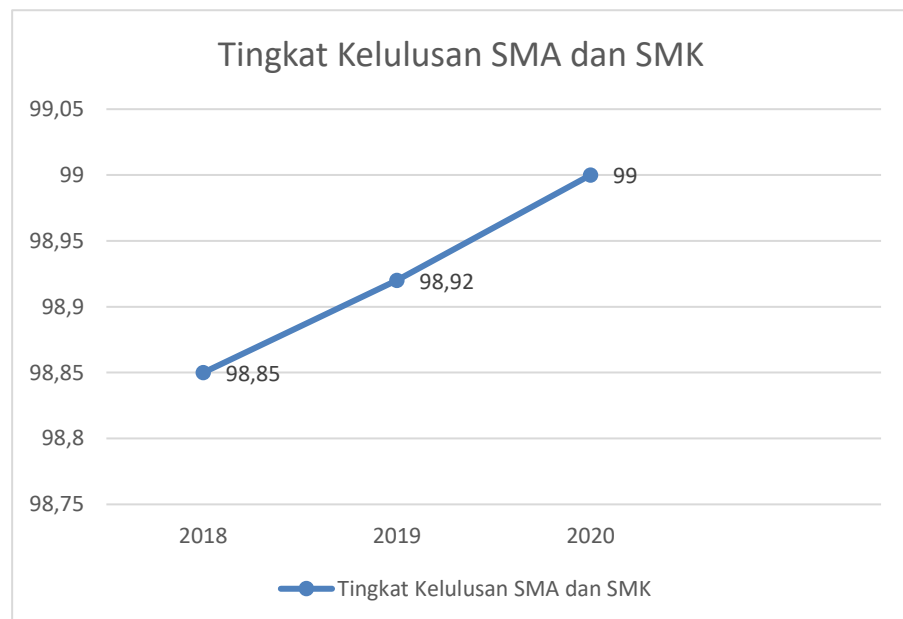
hendaknya saling mengetahui dan memahami keadaan anaknya sehingga timbul motivasi dari dalam diri siswa untuk berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi walaupun dia sudah merasa lelah, penat dan letih dalam belajar,.

Dari sisi tenaga pendidik, pandangan terhadap perkembangan prestasi belajar membawa konsekuensi kepada guru untuk harus meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru.

Jika dilihat dari pemerataan Guru, masih banyak kekurangan Guru PNS pada tingkat SMA dan SMK Negeri yang dikarenakan pensiun sehingga solusinya perlunya dilakukan penambahan keberadaan Guru PNS dan selanjutnya dilakukan penyebaran Guru baik PNS maupun non PNS dengan kategori yang sudah bersertifikasi dan belum bersertifikasi sehingga menunjang usaha peningkatan kompetensi Guru di tingkat SMAN dan SMKN di Provinsi Jambi.

4. Tingkat Kelulusan SMA dan SMK

Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir (2018)



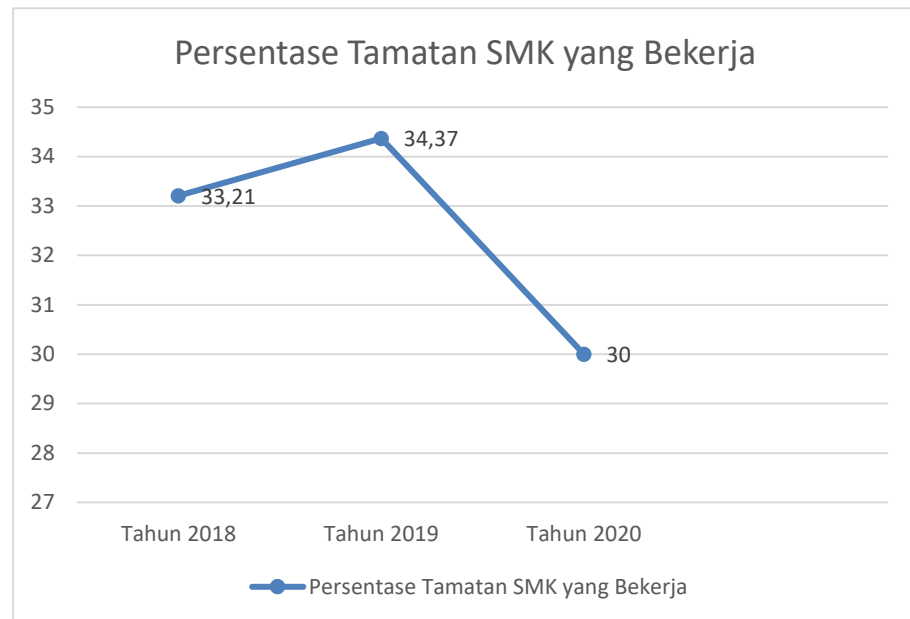
Jika dilihat dari grafik 3.4, indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan juga jika dilihat tabel. 3.2 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 hampir mendekati target yang diharapkan. Walaupun telah mendekati target, tentunya masih ada hambatan kedepan yang harus di hadapi.

Ketika dalam masa darurat penyebaran Covid-19 setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi menghapus ujian nasional (UN) sebagai faktor penentu kelulusan pelajar di tahun ajaran 2020/2021 maka syarat penentu kelulusan siswa bisa dengan mengadakan ujian sekolah (US), dengan syarat US tidak mengumpulkan siswa secara fisik atau US bisa dilakukan secara daring. Jika sekolah tidak siap mengadakan US daring, US dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Pembelajaran masa awal pandemi yaitu pembelajaran berbasis teknologi yang belum optimal dan banyak tantangan, namun sebagian besar siswa belajar dengan mengerjakan soal dari guru, sedangkan pembelajaran interaktif secara daring dilakukan kurang dari 40% siswa. Hambatan yang dihadapi Guru dalam belajar dari rumah diantaranya : kemampuan Guru dalam mengoperasikan perangkat digital yang belum optimal, masih ada siswa yang belum mempunyai kesediaan sarana dan prasarana (perangkat digital, akses internet), rendahnya dukungan internal siswa (komitmen, motivasi dan kedisiplinan), dukungan lingkungan siswa (orangtua dan anggota keluarga) belum optimal.

5. Persentase Tamatan SMK yang Bekerja

Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja Tahun 2020



Jika dilihat dari tabel 3.5, indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan menurun pada tahun 2020 namun jika dilihat tabel. 3.2 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 masih jauh dari target yang diharapkan.

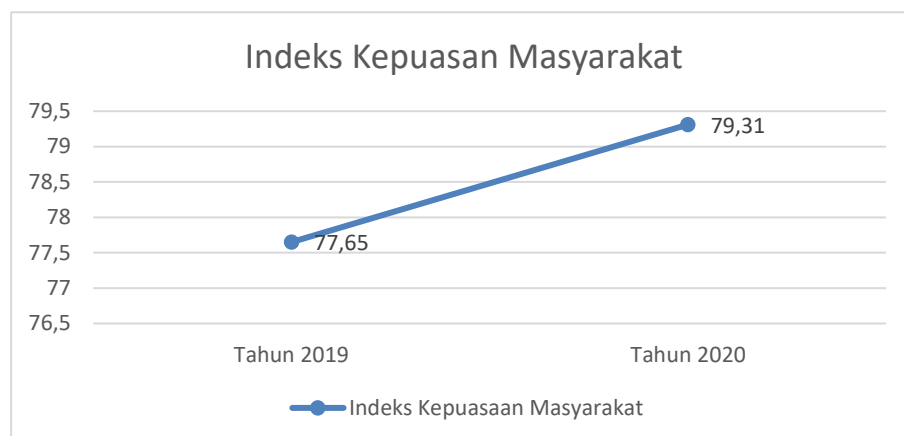
Hambatan yang dihadapi pada saat ini tentunya lapangan pekerjaan yang belum bisa menyerap tenaga kerja lulusan SMK sepenuhnya, hal itu tidak terlepas dari belum berjalannya inpres no 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, dan belum maksimalnya SMK yang berada di Provinsi Jambi yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terhadap lulusan SMK yang erat kaitannya dengan standar kompetensi keahlian tenaga kerja pada dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), begitu juga kurikulum yang diberikan dipakai pada satuan pendidikan belum maksimal diselaraskan dengan kebutuhan DU/DI. Berdasarkan permasalahan tersebut tentu perlunya solusi yang tepat yang harus dilakukan, dimulai dengan membuat roadmap (peta jalan) untuk revitalisasi SMK di Provinsi Jambi. Untuk mewujudkan revitalisasi SMK tersebut diperlukan kerjasama semua stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, organisasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga

sertifikasi dan uji kompetensi siswa, serta masyarakat sehingga sekolah menengah kejuruan dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara di masa pandemi covid 19 telah membuat guncangan yang cukup kuat terhadap lulusan SMK untuk mencari kerja yaitu pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari berbagai perusahaan. Agar dapat terus mendapatkan pekerjaan, tentunya pencari kerja tidak harus berkerja di sektor formal namun bisa menempuh ke sektor informal yaitu dunia usaha atau berwirausaha dan juga bekerja di bidang pertanian atau perkebunan yang juga memiliki tantangan kuat dimasa pandemi ini.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

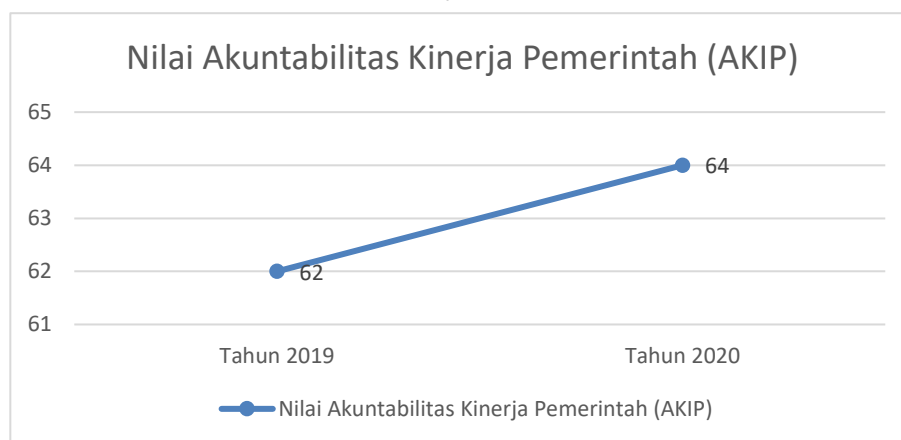
Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020



Jika dilihat dari tabel 3.6, indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 namun jika dilihat tabel. 3.2 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 telah mendekati target yang diharapkan. Keberhasilan capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari Program yang telah berjalan diantaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Grafik 3.7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2020



Jika dilihat dari tabel 3.6, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 namun jika dilihat tabel. 3.2 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 telah mendekati target yang diharapkan. Keberhasilan capaian tersebut tentunya dipengaruhi oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

E. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya Pendukung Kinerja

1. Tersedianya sumber daya aparatur kependidikan yang cukup dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan pendidikan, hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan yaitu :

Tabel. 3.5 Jumlah Pegawai Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sekolah Menengah	27
2	Diploma III	2
3	Strata 1	91
4	Strata 2	27

Tabel. 3.6 Jumlah Pegawai Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Perbidang Tahun 2020

No	Bidang	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat	49
2	Pendidikan SMA	22
3	Pendidikan SMK	21
4	Pendidikan PKLK	14
5	Guru dan Tenaga Kependidikan	26
7	UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	12

serta didukung dengan tenaga pegawai tidak tetap (PTT) yang handal dan terampil.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA dan SMK

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk menunjang capaian indikator APK dan APM pada SMA dan SMK yaitu dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada setiap satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Jambi melalui pelaksanaan Program Pendidikan Menengah SMA, Program Pendidikan Menengah SMK dan Program BOS dengan kegiatan diantaranya :

- a. Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA dengan sasaran satuan pendidikan menengah atas diberikan bantuan sarana dan prasarana
- b. Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK dengan sasaran satuan pendidikan kejuruan diberikan bantuan sarana dan prasarana
- c. Kegiatan BOS APBN dengan sasaran 132.633 siswa dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang disalurkan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB

2. Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB). Agar dapat berjalan dengan lancar dan optimal, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun 2020, sama halnya dengan Program Pendidikan Menengah dilaksanakan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui program PKLK dan Program BOS melalui kegiatan :

- a. Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK dengan sasaran satuan pendidikan khusus untuk pemberian bantuan sarana dan prasarana
- b. Kegiatan BOS APBN dengan sasaran 132.633 siswa dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang disalurkan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB

3. Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mempersiapkan siswa SMA untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Akreditasi B tentunya melalui peningkatan mutu pendidikan yang dimulai dengan ketersediaan sarana prasarana di sekolah, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peningkatan kompetensi Guru dan peningkatan daya saing siswa. Selain upaya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan BOS yang telah diuraikan di atas maka sangat penting dilakukan peningkatan kompetensi Guru SMA melalui Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selain itu juga perlu dilakukan Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan dan Peningkatan Daya Saing Peserta Didik dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas PTK SMA dengan sasaran 150 Guru dalam Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru SMA. Selain berupa pelatihan yang diberikan, ada wadah yang disebut Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata

pelajaran yang berada di suatu sanggar kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran serta pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru.

- b. Peningkatan Kualitas PTK SMK dengan sasaran Tenaga Pendidik SMK dalam Kegiatan pelatihan Kompetensi Kepala SMK dan Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru SMK. Selain berupa pelatihan yang diberikan, sama halnya seperti Tenaga Pendidik SMA, mempunyai kelompok yang disebut MGMP
- c. Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA dengan sasaran satuan pendidikan menengah atas dalam Kegiatan Pelatihan Implementasi Penguatan Kurikulum Muatan Lokal Provinsi Jambi
- d. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMA dengan sasaran Satuan Pendidikan Menengah atas dalam kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memenuhi standar akreditasi.
- e. Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMA
Berkaitan dengan layanan pendidikan di masa pandemi covid 19, bagi peserta didik berbakat hanya bisa mengikuti lomba-lomba pendidikan melalui dalam jaringan (daring) yaitu Kompetisi Sains Nasional (KSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan National Schools Debating Championship (NSDC) di tingkat nasional dengan sasaran peserta didik yang memiliki bakat dibidang sains, seni dan debat yang berprestasi

4. Tingkat Kelulusan SMA dan SMK

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam memberikan pembelajaran dan mendidik siswa sampai lulus ditingkat pendidikan menengah sama halnya dengan upaya yang dilakukan untuk mengantarkan siswa SMA sampai ke Perguruan Tinggi akreditasi B yang telah dijelaskan diatas. Serupa dengan kegiatan bidang SMA yang telah dijelaskan diatas, berikut kegiatan

yang diupayakan untuk indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK berkaitan dengan bidang SMK :

- a. Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMK dengan sasaran satuan pendidikan kejuruan dengan melakukan koordinasi bidang SMK berdasarkan hasil pertemuan seluruh indonesia pada Pertemuan “Koordinasi Program Bidang dan Strategi Pelaksanaanya” selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kesiapan uji kompetensi SMK.
- b. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK dengan sasaran satuan pendidikan menengah dalam kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memenuhi standar akreditasi

5. Persentase Tamatan SMK yang Bekerja

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk menunjang tamatan SMK untuk bekerja adalah melalui Program Pendidikan SMK melalui kegiatan :

- a. Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMK dengan sasaran satuan pendidikan kejuruan dengan melakukan koordinasi bidang SMK berdasarkan hasil pertemuan seluruh indonesia pada Pertemuan “Koordinasi Program Bidang dan Strategi Pelaksanaanya” selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kesiapan uji kompetensi SMK.
- b. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK dengan sasaran satuan pendidikan menengah dalam kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memenuhi standar akreditasi

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk menunjang layanan bagi masyarakat adalah melalui program rutin melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) tersebut tentunya melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan. Kegiatan tersebut diantaranya

1. Penyusunan laporan realisasi belanja langsung yaitu Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) dan dilakukan evaluasi setiap bulannya.
2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) yang disusun berdasarkan laporan realisasi dan evaluasi kegiatan terhadap target capaian indikator yang disusun dari setiap bidang.

3.2 Realisasi Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasaran organisasi. Jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.182.236.120.144,20 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 646.876.567.530,20 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 535.359.552.614,00, dengan 11 program dan 47 kegiatan.

Tabel. 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK SMA	65,73	95,69	-29,96
		APM SMA	66,81	95,69	-28,88
		APK SMK	85,74	97,20	-11,46
		APM SMK	80,40	97,20	-16,8
		Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	54,54	70,32	-15,78
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	25,50	99,13	-73,63
		Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	63,73	88,21	-24,48
		Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,60	79,36	20
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,72	86,05	10,72
		Nilai AKIP	104,69	77,91	26,78

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, terdapat dua sasaran strategis dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama : "Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus", sasaran pertama ini masih banyak perbaikan atas tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang masih tinggi terhadap capain kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, diantaranya Indikator APK dan APM pada SMA dan SMK, Persentase Tamatan SMK yang Bekerja, Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah, Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" namun tidak pada indikator Tingkat Kelulusan SMA/ SMK yang mempunyai tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 20 %.

Berdasarkan uraian diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi persentase tingkat efisiensi yang negatif disebabkan adanya hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator kinerja seperti yang telah dijelaskan pada poin analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan karena output yang dihasilkan disetiap kegiatan tidak bisa langsung berdampak pada tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dan jika dilihat pada masing-masing realisasi anggaran yang mendukung indikator kinerja diantaranya indikator APK dan APM SMA dan SMK, rata-rata diatas 90% sedangkan Indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja, Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" dan Tingkat Kelulusan SMA/SMK rata-rata dibawah 90% hal ini disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan di masa pandemi covid 19 belum dapat berjalan dengan maksimal sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa berjalan sepenuhnya diantaranya kegiatan Peningkatan Kualitas PTK SMA dan SMK.

2. Sasaran strategi kedua : "Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja, sasaran kedua ini berbeda dengan sasaran pertama, efisiensi pengguna anggaran terhadap capaian kinerja menghasilkan angka yang positif, yaitu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 10,72% dan Nilai AKIP sebesar 26,78%. Hal ini dipengaruhi oleh output kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dimana output dari kegiatan tersebut secara langsung dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk capaian kinerja indikator Nilai AKIP dipengaruhi langsung dari kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia pendidikan.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2020 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari sebelas program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian IKU selama tahun 2020.

Tabel. 4.1 Rekapitulasi pencapaian IKU selama 2020

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Indikator
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	3
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	2
3.	$66 \leq 75$	Sedang	2
4.	$51 \leq 65$	Rendah	2
5.	≤ 50	Sangat Rendah	1

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 indikator masuk kategori sangat baik, 2 indikator masuk kategori tinggi, 2 indikator masuk kategori sedang, 2 Indikator masuk kategori rendah dan 1 indikator masuk dalam kategori sangat rendah. Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2020 atau tahun keempat dari pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021, LKjIP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan dasar berpijak bagi Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan untuk satu tahun berikutnya sesuai perubahan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah masih ada budaya melakukan nikah di usia dini pada masyarakat, masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang dipengaruhi oleh anak yang masih berusia

sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga, masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMKSLB) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa mempunyai ABK adalah sebuah aib atau hal yang memalukan bagi keluarga yang seharusnya memberikan pendidikan (intervensi) yang bisa membuat ABK hidup mandiri dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat namun orang tua lebih senang mengucilkan mereka dari dunia luar, pandemi covid 19 menjadi masalah pada setiap bidang salah satunya peluang kesempatan kerja bagi siswa lulusan SMK untuk mencari kerja dan juga masih kurangnya Guru PNS pada tingkat SMA dan SMK Negeri.

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang.

Sebagai perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SYAHRAN, SE**
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. H. FACHRORI UMAR M.HUM**
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAMBI,

dto

DR. H. FACHRORI UMAR, M.HUM

Pihak Pertama,
PIt. KEPALA DINAS,

dto

MUHAMMAD SYAHRAN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19711109 200501 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi
Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK)	60,41% (SMA)
			31,42% (SMK)
		Angka Partisipasi Murni (APM)	50,68% (SMA)
			27,20% (SMK)
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	24%
		Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	56,49% (SMA)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,4%
		Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	55%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78
		Nilai AKIP	62

Program :

Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Aparatur
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Anggaran :

Rp. 6.917.299.994,00
Rp. 565.000.000,00
Rp. 135.000.000,00
Rp. 240.000.000,00
Rp. 480.600.000,00
Rp. 3.650.584.800,00
Rp. 54.208.733.000,00

Pendidikan SMA	Rp. 17.500.000.000,00
Pendidikan SMK	Rp. 8.902.667.000,00
Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 1.372.387.320,00
Bos	Rp. 260.697.318.000,00
Jumlah	Rp. 354.669.590.114,00

Jambi, Januari 2020

GUBERNUR JAMBI,

Plt. KEPALA DINAS,

dto

dto

DR. H. FACHRORI UMAR, M.HUM

MUHAMMAD SYAHRAN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19711109 200501 1 007